

**TESIS**

***ELECTRONIC GOVERNMENT* DALAM SISTEM KEAMANAN  
BERBASIS *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)*  
DI KOTA MAKASSAR**



**YUNIRA SYAILALHIKMA  
E012201016**

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### **ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM SISTEM KEAMANAN BERBASIS CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

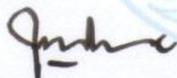
**YUNIRA SYAILALHIKMA**  
E012201016

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal **22 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. H. Moh. Thahir Haning, M.Si  
NIP 19570507 198403 1001



Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.AP  
NIP 19720507 200212 1001

Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik,



Dr. Gita Susanti, M.Si  
NIP 19590118 198503 1 006

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil Sukri, SIP., M.Si  
NIP 197508182008011008

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunira Syailalhikma  
NIM : E012201016  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang : S2

Menyatakan bahwa tesis berjudul **"ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM SISTEM KEAMANAN BERBASIS CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DIKOTA MAKASSAR"** benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 26 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Yunira Syailalhikma  
E012201016

## ABSTRAK

YUNIRA SYAILALHIKMA. *Electronic Government dalam Sistem Keamanan Berbasis Closed Circuit Television (CCTV) di Kota Makassar* (dibimbing oleh Moh. Thahir Haning dan Muh. Tang Abdullah).

Penelitian ini bertujuan menganalisis *electronic government* dalam sistem keamanan berbasis closed circuit television (CCTV) di Kota Makassar. Metode yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dan telaah dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Untuk mengukur *electronic government* dalam sistem keamanan berbasis CCTV digunakan *framework initiative e-government* yang dikemukakan oleh Nour, et. al. (2008) yang dapat diukur dengan menggunakan empat kuadran disposisi antara lain: disposisi informasional, disposisi transaksional, disposisi konsultasi, dan disposisi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keamanan berbasis CCTV di Kota Makassar relatif tinggi dan telah memenuhi empat kuadran *framework initiative e-government* oleh Nour et. al. (2008) tersebut yaitu disposisi informasional, disposisi transaksional, disposisi konsultasi, dan disposisi partisipatif.

Kata kunci: *electronic government*, sistem keamanan berbasis CCTV



## ABSTRACT

YUNIRA SYAILALHIKMA. *Electronic Government in Closed Circuit Television (CCTV) Based Security System in Makassar City* (supervised by Moh. Thahir Haning and Muh. Tang Abdullah)

This research aims to analyze electronic government in a closed circuit television (CCTV) based security system in Makassar City. The method used in this research was quantitative approach. The data collection techniques used were questionnaires and reviewing documents relevant to this research. To measure electronic government in a closed circuit television (CCTV) based security system in Makassar City, this research used initiative e-government framework proposed by Nour, et al (2008), which can be measured using four disposition quadrants, including informational disposition, transactional disposition, consultation disposition, and participative disposition. The research results show that the closed circuit television (CCTV) based security system in Makassar City is relatively high and has fulfilled the four quadrants of the e-government initiative framework by Nour et al (2008), namely informational disposition, transactional disposition, consultation disposition, and participatory disposition.

Keywords: electronic government, CCTV based security system



## KATA PENGANTAR



### ***Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadiran **Allah SWT** yang telah melimpahkan rahmatnya, anugerahnya, kesehatan dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Electronic Government Dalam Sistem Keamanan Berbasis Closed Circuit Television (CCTV) Di Kota Makassar**”. Tidak lupa pula Shalawat dan Salam tetap turunkan kepada **Nabi Muhammad SAW** yang telah membawa kita dari alam Jahiliah ke alam Islamiah seperti sekarang ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar M.AP pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga penulis menyadari sepenuhnya banyak kekurangan yang terdapat dalam tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini tak terhitung bantuan dari berbagai pihak yang diterima penulis dalam melewati segala macam kendala yang dialami pada saat penyusunan tesis ini. Teristimewa dengan penuh kasih sayang dan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada Orangtua, Ayahanda **Abdul Rahman, ST** dan Ibunda **Rosniah, SE., MM** yang telah membesarkan, mendidik, dan memotivasi penulis dengan limpahan cinta dan ketulusannya. Doa restu serta pengorbanannya yang tulus telah menjadi penyemangat yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menggapai cita-cita masa depan yang indah, baik dunia maupun akhirat

kelak nanti.

Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini secara khusus dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih **kepada Prof. Dr. H. Moh. Thahir Haning, M.Si** dan **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.AP** selaku komisi dewan penasehat yang dengan senang hati telah meluangkan waktu dan mencurahkan tenaga serta pikiran dalam mengarahkan dan membantu dalam penulisan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan para staf.
2. **Prof. Dr. Phil Sukri, SIP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan staf.
3. **Dr. Gita Susanti, M.Si** selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik.
4. **Prof. H. Hasniati, M.Si, Prof. H. Badu Ahmad, M.Si, Dr. Muh. Rusdi, M.Si** selaku dewan penguji dalam sidang proposal sampai ujian akhir program magister. Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri sidang tesis serta atas segala masukannya dalam penulisan tesis.

5. Seluruh **Dosen Program Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan arahan selama bangku perkuliahan.
6. Seluruh **Staf Program Magister Administrasi Publik** serta seluruh **Staf di Lingkup FISIP UNHAS** tanpa terkecuali. Terima kasih banyak atas bantuannya selama ini.
7. Seluruh **Pegawai Diskominfo Kota Makassar, Dishub Kota Makassar dan Kapolrestabes Kota Makassar**. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada penulis dan meluangkan waktu untuk memberi bantuan dalam pengumpulan data selama proses penelitian.
8. Seluruh **informan dan narasumber** serta semua pihak yang ikut serta membantu dalam proses penelitian dan pengumpulan data ditempat penelitian.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat, berguna, dan memberi kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan.

***Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar, 26 Januari 2024

Penulis

Yunira Syailalhikma

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAM PENGESAHAN.....	ii
HALAM PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Perspektif Administrasi Publik.....	15
2.1.1 Old Public Administration .....	15
2.1.2 New Public Management .....	20
2.1.3 New Public Service .....	23
2.1.4 Governance .....	25
2.2 Electronic Government.....	30
2.2.1 Tipe Relasi E-Government .....	34
2.2.2 Manfaat E-Government.....	36
2.2.3 Tahapan Dalam Membangun E-Government .....	37
2.2.4 Konsep Electronic Government.....	39
2.3 Konsep E-Readiness (Kesiapan Penerapan E-Government).....	43
2.4 Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) .....	51
2.5 Sistem Keamanan Berbasis Closed Circuit Television (CCTV) di	

Kota Makassar.....	55
2.6 Penelitian Terdahulu .....	57
2.7 Kerangka Pikir .....	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
3.1 Pendekatan Dan Desain Penelitian .....	65
3.2 Unit Analisis .....	66
3.3 Definisi Operasional .....	67
3.4 Lokasi Penelitian .....	70
3.5 Sumber Data Penelitian .....	70
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	71
3.7 Populasi dan Sampel .....	73
3.8 Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	78
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	78
4.1.1 Gambaran Umum Kota Makassar .....	78
4.1.2 Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar .....	81
4.1.3 Profil Dinas Perhubungan Kota Makassar .....	87
4.1.4 Profil Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.....	91
4.2 Sistem Keamanan Berbasis Closed Circuit Television di Kota Makassar .....	97
4.2.1 Program War Room CCTV Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.....	97
4.2.2 Program CCTV ITCS Dinas Perhubungan Kota Makassar .....	106
4.2.3 Program CCTV E-TLE E-Tilang Polrestabes Kota Makassar ...	111
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	120
5.1 Karakteristik Responden .....	120
5.2 Analisis Penelitian .....	122
5.2.1 Disposisi Informasional.....	122
5.2.2 Disposisi Transaksional.....	125

5.2.3 Disposisi Konsultasi.....	143
5.2.4 Disposisi Partisipatif .....	158
5.3 Pembahasan .....	177
5.3.1 Disposisi Informasional.....	177
5.3.2 Disposisi Transaksional .....	179
5.3.3 Disposisi Konsultasi.....	182
5.3.4 Disposisi Partisipatif.....	185
 BAB VI PENUTUP .....	 200
6.1 Kesimpulan .....	200
6.2 Saran .....	202
 DAFTAR PUSTAKA.....	 204
LAMPIRAN .....	206

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kriminalitas Kota Makassar Tahun 2020-2022 .....	7
Tabel 1.2 10 Daerah Dengan Kejahatan Tertinggi di Indonesia.....	8
Tabel 1.3 Jumlah Titik CCTV Kota Makassar Berdasarkan Jenis CCTV .....	12
Tabel 2.1 Perbandingan Perkembangan Perspektif OPA, NPM dan NPS ...	24
Tabel 2.2 Indikator E-Readiness .....	50
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	58
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	73
Tabel 3.2 Kategori Kriteria Persentase .....	77
Tabel 4.1 Sistem Keamanan Berbasis CCTV di Kota Makassar.....	118
Tabel 4.2 Angka Kriminalitas di Kota Makassar Tahun 2014-2021 .....	119
Tabel 5.1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden.....	121
Tabel 5.2 Karakteristik Utama Responden .....	121
Tabel 5.3 Nilai Akses Informasi Pemerintah .....	123
Tabel 5.4 Rentang Nilai Akses Informasi Pemerintah.....	123
Tabel 5.5 Kategori Kriteria Persentase Akses Informasi Pemerintah.....	124
Tabel 5.6 Nilai Ketersediaan Layanan.....	126
Tabel 5.7 Rentang Nilai Ketersediaan Layanan .....	127
Tabel 5.8 Kategori Kriteria Persentase Ketersediaan Layanan.....	127
Tabel 5.9 Nilai Efisiensi / Ekonomi .....	130
Tabel 5.10 Rentang Nilai Efisiensi / Ekonomi .....	131
Tabel 5.11 Kategori Kriteria Persentase Efisiensi / Ekonomi .....	132
Tabel 5.12 Nilai Efektivitas / Kualitas Pelayanan .....	135
Tabel 5.13 Rentang Nilai Efektivitas / Kualitas Pelayanan.....	137
Tabel 5.14 Kategori Kriteria Persentase Efektivitas / Kualitas Pelayanan....	137
Tabel 5.15 Nilai Integritas.....	140
Tabel 5.16 Rentang Nilai Integritas .....	141
Tabel 5.17 Kategori Kriteria Persentase Integritas.....	141
Tabel 5.18 Nilai Daya Tanggap Demokrasi .....	144
Tabel 5.19 Rentang Nilai Daya Tanggap Demokrasi.....	145
Tabel 5.20 Kategori Kriteria Persentase Daya Tanggap Demokrasi.....	145

Tabel 5.21 Nilai Integritas.....	148
Tabel 5.22 Rentang Nilai Integritas .....	148
Tabel 5.23 Kategori Kriteria Persentase Integritas.....	149
Tabel 5.24 Nilai Akuntabilitas Publik.....	151
Tabel 5.25 Rentang Nilai Akuntabilitas Publik .....	152
Tabel 5.26 Kategori Kriteria Persentase Akuntabilitas Publik .....	153
Tabel 5.27 Nilai Transparansi.....	155
Tabel 5.28 Rentang Nilai Transparansi .....	156
Tabel 5.29 Kategori Kriteria Persentase Transparansi.....	156
Tabel 5.30 Nilai Ekuitas.....	159
Tabel 5.31 Rentang Nilai Ekuitas .....	159
Tabel 5.32 Kategori Kriteria Persentase Ekuitas .....	140
Tabel 5.33 Nilai Daya Tanggap Demokrasi .....	162
Tabel 5.34 Rentang Nilai Daya Tanggap Demokrasi.....	162
Tabel 5.35 Kategori Kriteria Persentase Daya Tanggap Demokrasi.....	163
Tabel 5.36 Nilai Akuntabilitas Publik.....	165
Tabel 5.37 Rentang Nilai Akuntabilitas Publik .....	166
Tabel 5.38 Kategori Kriteria Persentase Akuntabilitas Publik .....	166
Tabel 5.39 Nilai Efisiensi / Ekonomi .....	169
Tabel 5.40 Rentang Nilai Efisiensi / Ekonomi.....	169
Tabel 5.41 Kategori Kriteria Persentase Efisiensi / Ekonomi .....	170
Tabel 5.42 Nilai Efektivitas / Kualitas Pelayanan .....	173
Tabel 5.43 Rentang Nilai Efektivitas / Kualitas Pelayanan.....	175
Tabel 5.44 Kategori Kriteria Persentase Efektivitas / Kualitas Pelayanan....	175
Tabel 5.45 Disposisi Informasional.....	178
Tabel 5.46 Disposisi Transaksional .....	181
Tabel 5.47 Disposisi Konsultasi.....	184
Tabel 5.48 Disposisi Partisipatif .....	188
Tabel 5.49 Rekapitulasi E-Government dalam Sistem Keamanan Berbasis CCTV di Kota Makassar .....	190

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Framework Initiative E-Government Nour, et al (2008).....	40
Gambar 2.2 Model E-Readiness.....	50
Gambar 2.3 Kerangka Konsep.....	64
Gambar 4.1 Peta Kota Makassar.....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Administrasi publik merupakan wadah dan ruang para aparat pemerintah atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik. Peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara. Dengan demikian ketika administrasi publik mampu mengubah perilaku, keberadaan dan kompetensi sumber daya yang ada maka secara makro akan menunjukkan kesejahteraan suatu negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembenahan pola lama ke pola baru yang lebih dinamis dan tentunya inovatif (Keban 2004).

Administrasi publik dituntut agar selalu memodernisasikan dirinya, menemukan strategi dan pendekatan yang lebih jitu dan terus berusaha untuk memperbaharui teori dan instrumentasi agar tidak semakin tertinggal dengan kemajuan jaman. Dalam hal ini, salah satu *trend* besar yang harus diintegrasikan ke dalam disiplin administrasi publik adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

Pada abad ini, suatu perkembangan yang semakin pesat ialah semakin meningkatnya kemampuan dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi beserta penerapannya. Perkembangan tersebut diungkapkan sebagai suatu perkembangan dramatis karena telah mampu merevolusi

kehidupan manusia dengan lebih memudahkan segala hal di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. *Internet* dan perkembangan teknologi lainnya dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara mengelola informasi, menentukan kemampuan berbicara dan mengungkapkan pendapat, menyampaikan maksud dan respon maupun mengelola informasi yang dimiliki untuk membuat, mengambil keputusan dan bertindak berdasar informasi yang dimiliki.

Berkembangnya teknologi informasi ini telah membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat dan juga tanggapan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk pengambilan keputusan yang mulai dilakukan dengan berbagai teknologi informasi.

Tujuan pemberian pelayanan publik sendiri adalah untuk mewujudkan konsep *good governance*. Dalam kaitannya dengan perwujudan pelayanan publik yang *good governance*, pemerintah perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Hage dan Power dalam Anwar (2003:111) menjelaskan salah satu ciri yang menonjol di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi adalah digunakannya teknologi. Seiring dengan perkembangannya, teknologi baru bahkan muncul dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Menurut (Sudarto, 2006), teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu solusi memperbaiki birokrasi, untuk mencapai ke tata pemerintahan yang baik. Di lingkungan pemerintah, teknologi

informasi dan komunikasi dengan sistem *e-government* merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas pemerintahan, maupun yang terpenting untuk pemberian pelayanan yang prima dari pemerintah untuk masyarakat yang ditujukan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa. Selain itu, *e-government* menjanjikan suatu hasil kerja yang efisien, partisipasi, berkeadilan, demokrasi dan akuntabilitas.

Teknologi informasi yang digunakan pemerintah akan sangat besar perannya, terutama dalam hal penyediaan layanan publik yang akurat dan terpadu baik bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hubungan antara pemerintah dengan teknologi informasi ini memunculkan konsep *Electronic Service Delivery (ESD)*, yaitu melalui media elektronik dan digital pemerintah menyediakan jasa pelayanan masyarakat. ESD ini kemudian berkembang dan menjadi awal munculnya *e-government*, yaitu mekanisme dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana utama yang menghubungkan para *stakeholder*, baik dengan masyarakat umum, kalangan industri, dan sektor publik lainnya (Indrajit, 2013:2).

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) dalam Indrajit (2006:2) definisi *e-government* merupakan "*electronic government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of*

*government.” That means electronic government (e-government)* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *area network* yang luas, internet dan *mobile computer*) oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan. Dengan *e-government* memungkinkan masyarakat luas dapat mengakses semua informasi pemerintah dan layanan melalui sebuah pemanfaatan teknologi yang dikelola oleh bagian pemerintahan.

Kecenderungan pemakaian teknologi dalam organisasi publik saat ini tidak dapat dihindari lagi. Inisiatif *electronic government* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 pada tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, *electronic government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu tempat dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mempermudah hubungan antar masyarakat dan pemerintah. *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh badan pemerintahan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. *e-government* diterapkan di Indonesia untuk menunjang kinerja dalam sebuah pemerintahan.

Cakupan *e-government* sendiri bukan hanya untuk kepentingan instansi pemerintahan namun juga merupakan kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang dibutuhkan masyarakat luas.

Pelaksanaan *electronic government* sudah mulai berkembang di Indonesia dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yang berisi spesifikasi tanggung jawab badan pemerintah, baik pusat maupun daerah dan menitikberatkan pada pentingnya layanan pemerintah di Indonesia yang bersifat *online*. Berdasarkan Inpres tersebut, setiap gubernur, walikota dan dewan eksekutif ditugaskan untuk bertanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan *e-government* di daerah mereka. Pemerintah meminta pemerintah daerah untuk menerapkan *e-government* dalam memberikan pelayanan serta menyelesaikan permasalahan publik.

Pentingnya pengembangan *e-government* dalam administrasi publik, dapat memberikan manfaat khususnya bagi pelayanan publik, di antaranya adalah sebagai berikut: (a) Pelayanan jasa lebih baik kepada masyarakat. Informasi disediakan tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara sengaja datang ke kantor pemerintah selama terdapat jaringan internet; (b) Peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil. Adanya keterbukaan diharapkan dapat merubah hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, karena keterbukaan ini diharapkan dapat menghilangkan rasa curiga dan kekesalan dari

semua pihak terhadap pemerintah; (c) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi mudah diperoleh; (d) Pelaksanaan pemerintah lebih efisien; dan (e) Bagi pemerintah, pembuatan surat-surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat. Pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efisien dan pelacakan data/informasi seseorang dapat lebih mudah dilaksanakan (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Maka dari itu, *e-government* dibutuhkan guna menambah ketepatan, kejelasan, tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dengan tujuan menambah kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik khususnya dari aparat birokrasi.

Penerapan *electronic government* pada lingkup administrasi publik terkhusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran *electronic government* dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya *good governance* secara transparansi, akuntabilitas, responsif, setara dan inklusif, efektif dan efisien, mengikuti aturan hukum, partisipatif, dan berorientasi kepada kesepakatan. Perkembangan infrastruktur *electronic government* berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di segala bidang termasuk bidang pelayanan publik dengan melakukan upaya terobosan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi seperti sistem keamanan berbasis *closed circuit television (CCTV)* yang telah dilakukan di Kota Makassar. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar berupaya untuk mengatasi masalah publik, salah satunya masalah keamanan kota untuk kepentingan masyarakat melalui sistem keamanan

berbasis CCTV. Pentingnya sistem keamanan berbasis *closed circuit television* (CCTV) ini dalam administrasi publik ialah hadir untuk membuka ruang revitalisasi seluruh sistem keamanan dalam pemerintahan dan khususnya kepada masyarakat kota dan kaitannya dengan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik terkait keamanan dan ketertiban yang memuaskan kepada masyarakat.

Sangat sulit dipungkiri bahwa di setiap kota atau daerah pasti memiliki permasalahan publik yang berbeda-beda atau mungkin ada yang mengalami permasalahan publik yang sama di daerahnya karena berbicara mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan khususnya dalam menyelesaikan permasalahan publik yang ingin diatasi bersama-sama. Salah satu permasalahan publik di Kota Makassar yaitu masalah keamanan.

Menilik masalah keamanan yang ada di Kota Makassar, peneliti melihat bahwa kondisi Kota Makassar ini tidak aman dan meresahkan masyarakat sekitar. Dan berikut ialah jumlah keseluruhan kriminalitas atau tindak pidana yang terjadi di Kota Makassar pada tahun 2020 sampai tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kriminalitas Kota Makassar Tahun 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kriminalitas</b>
2020	2.435
2021	3.980
2022	9.501

Sumber: Polrestabes Kota Makassar

Sementara itu, Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukotakan Kota Makassar juga menjadi salah satu daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**10 Daerah Dengan Kejahatan Tertinggi di Indonesia Tahun 2018-2020**

Daerah	Angka Kejahatan Tahun 2018-2020
Sumatera Utara	32.990
Metro Jaya	26.585
Jawa Timur	17.642
Sulawesi Selatan	12.815
Sumatera Selatan	12.189
Jawa Barat	11.256
Jawa Tengah	10.712
Nusa Tenggara Barat	8.591
Riau	8.194
Sumatera Barat	7.992

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa 10 daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia, yang menempatkan Provinsi Sumatera Utara urutan pertama provinsi paling tinggi dan Provinsi Sulawesi Selatan urutan keempat provinsi paling tinggi di Indonesia, dengan angka kejahatan Sumatera Utara sebesar 32.990, Metro Jaya sebesar 26.585, Jawa Timur sebesar 17.642, Sulawesi Selatan sebesar 12.815, Sumatera Selatan sebesar 12.189, Jawa Barat sebesar 11.256, Jawa Tengah sebesar 10.712, Nusa Tenggara Barat sebesar 8.591, Riau sebesar 8.194 dan Sumatera Barat sebesar 7.992.

Kemudian pemerintah Kota Makassar menyikapinya dengan menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV. Pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang telah ditempatkan di beberapa titik strategis

di Kota Makassar khususnya pada zona merah tingginya tingkat kriminalitas dengan tujuan agar dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak kriminalitas serta menekan angka kriminalitas dan memantau kegiatan masyarakat sehingga seluruh tindak pelaku kejahatan dan para pelanggar hukum tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Yang dimaksud dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah sebuah teknologi digital berupa kamera yang dirancang khusus untuk memantau dan mengirim sinyal atau video secara langsung ke monitor komputer di tempat tertentu. Tujuan dan kegunaan CCTV yang dipasang di beberapa titik strategis yakni agar dapat memantau situasi dan kondisi ditempat tertentu, sehingga pemerintah dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak kriminalitas atau lebih tepatnya dapat dijadikan sebagai bahan bukti dari tindak kejahatan yang telah terjadi. Adapun payung hukum dari pada bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam menjalankan sistem keamanan berbasis teknologi digital CCTV di ialah berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Dan Pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Bangunan Dan Gedung yang merupakan acuan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Mengatur Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka perlindungan kepada masyarakat,

mempermudah penanganan ancaman ketentraman dan ketertiban umum di ruang publik sekitar bangunan atau gedung dan mengintegrasikan sistem keamanan CCTV yang ada di bangunan atau gedung dengan sistem informasi pemerintah daerah sehingga dapat mengoptimalkan penanganan bentuk ancaman atau gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Ditetapkannya Peraturan Walikota Makassar diharapkan dapat direspon dengan sigap dan bersifat sukarela atau partisipatif oleh seluruh masyarakat dan aktor-aktor yang terlibat dalam menjalankan sistem keamanan, khususnya pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan sistem keamanan berbasis CCTV tersebut.

Dalam pemanfaatan *e-government* untuk permasalahan keamanan di Kota Makassar, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar telah memasang 5.000 CCTV. Pemasangan lebih dari 5.000 CCTV ini untuk menekan aksi kriminalitas di Kota Makassar. Pemasangan CCTV tersebut adalah upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dalam mengambil bagian mendukung pemerintah Kota Makassar dan juga pihak keamanan dalam menekan kriminalitas yang sering terjadi dan merugikan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dalam pelaksanaan sistem keamanan berbasis CCTV tersebut dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta akuntabel dan transparan.

Fungsi sistem keamanan CCTV selain untuk membantu Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan informasi mengenai keadaan jalan raya maupun tempat khusus lainnya, sistem keamanan CCTV tersebut juga dapat membantu Dinas Komunikasi dan Informatika terkait untuk *memonitoring* bagaimana perkembangan keadaan suatu kota setiap harinya dari jalan raya, baik itu dari tingkat kemacetan, kriminalitas, bencana maupun masalah lainnya. Dimana pada proses pelaksanaannya, pengoperasionalan dan *maintenance* CCTV di Kota Makassar tidak lepas dari berbagai masalah dan kendala.

Berdasarkan observasi awal, adapun kendala yang dihadapi pada sistem keamanan berbasis CCTV di Kota Makassar ialah terkait jaringan internet yang sering bermasalah pada waktu tertentu. Kemudian kendala lainnya ialah terdapat beberapa CCTV yang telah terpasang namun tidak berfungsi atau rusak. Bahkan pada Maret 2023, terhitung ratusan CCTV di sejumlah lorong-lorong di Kota Makassar dikatakan belum terpasang. Hal ini dikarenakan pasokan listrik yang terbatas, titik, hingga arah sorotan CCTV. Sehingga ketika terjadi tindak kriminalitas yang dimana membutuhkan informasi visual dari CCTV untuk memecahkan masalah kriminalitas tersebut akan menjadi terkendala sebab CCTV tersebut tidak berfungsi atau rusak karena gangguan pada jaringan internet dan pasokan listrik yang tidak mumpuni.

Kemudian pemasangan CCTV di Kota Makassar, hanya terdapat di beberapa titik, dan hal tersebut belum bisa menunjang untuk terjadinya

kedisiplinan, melihat Kota Makassar yang padat dan masih banyak lagi titik-titik lokasi rawan dan sensitif yang semestinya dipasang CCTV. Berikut ialah jumlah titik pemasangan kamera CCTV yang terpasang di Kota Makassar berdasarkan jenis program CCTV.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Titik CCTV Kota Makassar Berdasarkan Jenis CCTV**

Nama CCTV	Jumlah Titik
CCTV Smart & Sombere' City Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	230 titik
CCTV ITCS Dinas Perhubungan Kota Makassar	15 titik
CCTV ETLE Kepolisian Resor Kota Besar Makassar	20 titik

Sumber: Hasil Olahan Data, 2023

Masalah sistem keamanan CCTV di Kota Makassar lainnya juga dikarenakan ada perbedaan pendapat antara dewan lorong, dewan masyarakat terkait pemasangan CCTV tersebut sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar masih menahan untuk pemasangan CCTV tersebut.

Berdasarkan dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menaruh perhatian terhadap penelitian pada bidang *electronic government* dengan judul *Electronic Government Dalam Sistem Keamanan Berbasis Closed Circuit Television (CCTV) di Kota Makassar*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah *Electronic Government* dalam

Program Sistem Keamanan Berbasis *Closed Circuit Television* (CCTV) di Kota Makassar dengan rincian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana disposisi informasional dalam sistem keamanan berbasis *closed circuit television* (CCTV) di Kota Makassar?
2. Bagaimana disposisi transaksional dalam sistem keamanan berbasis *closed circuit television* (CCTV) di Kota Makassar?
3. Bagaimana disposisi konsultasi dalam sistem keamanan berbasis *closed circuit television* (CCTV) di Kota Makassar?
4. Bagaimana disposisi partisipatif dalam sistem keamanan berbasis *closed circuit television* (CCTV) di Kota Makassar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis disposisi informasional dalam sistem keamanan berbasis *closed circuit television* (CCTV) di Kota Makassar
2. Untuk menganalisis disposisi transaksional dalam sistem keamanan berbasis *closed circuit television* (CCTV) di Kota Makassar
3. Untuk menganalisis disposisi konsultasi dalam sistem keamanan berbasis *closed circuit television* (CCTV) di Kota Makassar
4. Untuk menganalisis disposisi partisipatif dalam sistem keamanan berbasis *closed circuit television* (CCTV) di Kota Makassar

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain:

- Manfaat Akademis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi khususnya terkait pelaksanaan *electronic government* dalam sistem keamanan publik berbasis CCTV demi penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi kajian yang dimaksudkan untuk meninjau peran program sistem keamanan berbasis *closed circuit television* (CCTV) dalam meningkatkan pelayanan keamanan publik berbasis *closed circuit television* (CCTV) di Kota Makassar.
- Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran dan bahan pertimbangan, khususnya pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta bagi daerah otonom di Indonesia dalam pengambilan keputusan, baik kebijakan, regulasi, maupun dalam pembuatan inovasi-inovasi kebijakan pelaksanaan *electronic government* pada sistem keamanan publik berbasis CCTV khususnya pada Pemerintah Kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perspektif Administrasi Publik

Sejak berkembangnya studi administrasi publik dari klasik hingga kontemporer, telah mengalami beberapa fase perkembangan perspektif. Perkembangan perspektif administrasi publik dimulai pada perspektif *The Old Public Administration*, *The New Public Management*, *The New Public Service* (Bovaird dan Loffler, 2003; Denhardt dan Denhardt, 2004, dan *The New Public Governance*) (Osborne, 2010).

##### 2.1.1 *Old Public Administration*

Paradigma pertama dimulai dari paradigma *The Old Public Administration* (OPA) seperti menurut Denhart dan Denhart (2004). Paradigma ini pertama kali dikemukakan oleh Woodrow Wilson. Dia menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncullah konsep ini, konsep *Old Public Administration* ini memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, dimana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam memahami paradigma ini, ada kunci yang digunakan yaitu pertama adanya perbedaan yang jelas antara politik (*policy*) dengan administrasi. Kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya hak organisasi publik diberikan kepada manajernya (pemimpin), agar tugas-tugas dapat

dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam bukunya "*The Study of Administration*", Wilson berpendapat bahwa problem utama yang dihadapi pemerintah eksekutif adalah rendahnya kapasitas administrasi. Untuk mengembangkan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien, diperlukan pembaharuan administrasi pemerintahan dengan jalan meningkatkan profesionalisme manajemen administrasi negara. Untuk itu, diperlukan ilmu yang diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mencetak aparatur publik yang profesional dan non-partisan. Maka, tema dominan dari pemikiran Wilson adalah aparat atau birokrasi yang netral dari politik. Administrasi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan terpisah dari hiruk pikuk kepentingan politik. Inilah yang dikenal sebagai konsep dikotomi politik dan administrasi. Administrasi negara merupakan pelaksanaan hukum publik secara detail dan terperinci, karena itu menjadi bidangnya birokrat teknis, sedangkan politik menjadi bidangnya politisi.

Paradigma administrasi publik model klasik juga dapat dilihat melalui model "*oldchesnuts*" dari Peters (1996 dan 2001), dimana administrasi publik berdasarkan pada pegawai negeri yang politis dan terinstitusionalisasi; organisasi yang hirarkis dan berdasarkan peraturan; penugasan yang permanen dan stabil; banyaknya pengaturan internal; serta menghasilkan keluaran yang seragam (lihat dalam Oluwu, 2002 dan Frederickson, 2004). Kelebihan dari administrasi publik klasik adalah politik yang tidak mencampuri kegiatan administrasi di pemerintahan. Sehingga

tidak ada hasil dari kegiatan administrasi terhadap publik yang berbau politik. Administrasi publik klasik juga memampukan birokrasi memiliki daya stabilitas yang sangat tinggi, karena para birokrat diputuskan berdasarkan pertimbangan obyektif, para birokrat dilindungi dari kewenangan hukum, dan masa depan para birokrat terjamin. Struktur birokrasi yang kompleks dan formal serta berdasarkan dokumen resmi akan menghindarkan birokrasi dari penyalahgunaan wewenang baik oleh birokrasi karier maupun birokrasi politisi yang berkuasa untuk sementara. Administrasi publik klasik ini juga dapat diimplementasikan di negara berbentuk kerajaan. Selanjutnya, sifat netral dari administrasi publik klasik ini dapat menghindarkan birokrasi dari kepentingan figur atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam hal ini karakter *Old Public Administration* dicirikan oleh kegiatan pemerintah yang terfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh administrator publik yang akuntabel dan bertanggung jawab secara demokratis kepada *elected official*. Nilai dasar utama yang diperjuangkan dalam *Old Public Administration* adalah efisiensi dan rasionalitas sebagai sebuah sistem tertutup. Fungsi administrator publik didefinisikan sebagai *planning, organizing, staffing, directing, coordinating* dan *budgeting*.

Menurut Wilson bidang Administrasi sama dengan bidang bisnis maka dari itu munculah konsep ini, konsep *Old Public Administration* ini memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan,

dimana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua kunci dalam memahami OPA ini, pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik (*policy*) dengan administrasi. Kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya hak organisasi publik diberikan kepada manajernya (pemimpin), agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Paradigma OPA memiliki tiga pemikiran, yaitu :

Pertama, paradigma dikotomi yang dikemukakan oleh Henry, memiliki dua kunci pokok yaitu: politik berbeda (*distinct*) dengan administrasi. Politik adalah arena dimana kebijakan (*policy*) diambil sehingga administrasi tidak berhak berada dalam arena tersebut. Administrasi hanya bertugas mengimplementasikan (*administered*) kebijakan tersebut.

OPA juga tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip manajemen ilmiah (*scientific management*) Frederick W. Taylor dan manajemen klasik POSDCORB ciptaan Luther Gullick. Administrasi negara harus berorientasi secara ketat kepada efisiensi. Semua sumber daya (*man, material, machine, money, method, market*) digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai prinsip efisiensi.

Kedua, manusia rasional (administratif) Herbert Simon juga memberikan pengaruh terhadap OPA. Menurut Simon, manusia dipengaruhi oleh rasionalitas mereka dalam mencapai tujuan-tujuannya. Rasionalitas yang dimaksud di sini hampir sama dengan efisiensi yang

dikemukakan oleh aliran *scientific management*. Manusia yang bertindak secara rasional ini disebut dengan manusia administratif (*administrative man*). Ketiga, teori pilihan publik (*public choice*) merupakan teori yang melekat dalam OPA. Teori pilihan publik berasal dari filsafat manusia ekonomi (*economic man*) dalam teori-teori ekonomi. Menurut teori pilihan publik manusia akan selalu mencari keuntungan atau manfaat yang paling tinggi pada setiap situasi dalam setiap pengambilan keputusan. Manusia diasumsikan sebagai makhluk ekonomi yang selalu mencari keuntungan pribadi melalui serangkaian keputusan yang mampu memberikan manfaat yang paling tinggi.

Dalam buku yang ditulis oleh Miftah Thoha, yang berjudul ilmu administrasi publik kontemporer dijelaskan bahwa Denhart & Denhart (2004) menguraikan karakteristik dari *Old Public Administration* yaitu bahwa *Pertama* fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. *Kedua* kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik. *Ketiga* administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan; mereka hanya bertanggung-jawab mengimplementasikan kebijakan publik. *Keempat* pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung-jawab, dan *Kelima* kepada pejabat politik (*elected officials*) dan dengan diskresi terbatas, serta *Keenam* nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.

Herbert Simon dalam bukunya yang berjudul “*Administrative Behavior*”, menjelaskan bahwa dimana munculnya konsep rasional model. *Mainstream* dalam OPA ini muncul dari ide-ide inti yang ada, diantaranya :

1. Pemerintah memberikan perhatian langsung dalam pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
2. Kebijakan publik dan administrasi saling berkaitan dengan merancang serta melaksanakan kebijakan untuk tujuan politik.
3. Administrasi publik hanya berperan kecil dalam pembuatan kebijakan dibandingkan dalam pengimplementasian kebijakan publik.
4. Para administrator berupaya memberikan pelayanan yang bertanggungjawab.
5. Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.
6. Program kegiatan di administrasikan dengan baik dan dikontrol oleh para pejabat publik yang memiliki hierarki dalam organisasi.
7. Nilai utama dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
8. Administrasi publik dilakukan secara efisien dan tertutup.
9. Peran administrasi publik dirumuskan secara luas seperti POSDCRB.

### **2.1.2 *New Public Management***

Perspektif selanjutnya adalah *The New Public Management*. Secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling*, *benchmarking* dan *lean management*. Bagi yang lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. *New Public Management* (NPM) merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara industri. Sistem ini dikembangkan di wilayah Anglo Amerika sejak paruh kedua tahun 80-an dan telah mencapai status sangat tinggi khususnya di Selandia Baru. Perusahaan-perusahaan umum diprivatisasi, pasar tenaga kerja umum dan swasta dideregulasi, dan dilakukan pemisahan yang jelas antara penetapan strategis wewenang negara oleh lembaga-lembaga politik (apa yang dilakukan negara) dan pelaksanaan operasional wewenang oleh administrasi (pemerintah) dan oleh badan penanggung jawab yang independen atau swasta. Administrasi publik mulai mengenalkan *New Public Management* (NPM) yang merupakan paradigma baru pada tahun 1990-an. Istilah NPM pertama kali dikemukakan Crishtopher Hood dalam artikelnya “ *All Public Management of All Seasons*”. Nama *New Public Management* sering disebut dengan nama lain misalnya *Post-Bureucratis Paradigm* (Barzeley, 1992), dan *Reinventing Government* (Osborne dan Gaebler, 1992).

*New Publik Management* (NPM) adalah paradigma baru dalam manajemen sektor publik. NPM biasanya dihubungkan dengan *Old Public*

*Management* (OPM). Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an dan digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. NPM menekankan ada kontrol atas *output* kebijakan pemerintah, desentrallisasi otoritas manajemen, pengenalan pada dasar kuasi-mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi *customer*. Asal NPM berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Selama ini birokrasi erat dikaitkan dengan manajemen sektor publik itu sendiri. Birokrasi dianggap erat dan berkaitan dengan keengganan untuk maju, kompleksitas hirarki jabatan dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang *top-down*. Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan adalah pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan pengadministrasiannya.

Paradigma NPM memiliki konsep yang terkait dengan manajemen kinerja sektor publik, yang mana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. NPM mengacu kepada sekelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor privat (bisnis) pada organisasi sektor publik. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha. NPM menganjurkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintah kepada sektor swasta. Inti dari ajaran NPM dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantikannya dengan perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja.
2. Pemerintah sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel.
3. Menetapkan tujuan dan target organisasi dan personel lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang jelas.
4. Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari daripada netral.
5. Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang berarti pemberian pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi, melainkan bisa diberikan oleh sektor swasta.
6. Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi.

### **2.1.3 New Public Service**

Perspektif yang ketiga disebut dengan *The New Public Service* oleh Denhart & Denhart dalam bukunya yang berjudul "*The New Public Service, Serving Not Steering*" yang diterbitkan penerbit ME Sharpe, Inc. New York pada tahun 2003. Paradigma ini secara umum alur pikirnya menentang perspektif-perspektif sebelumnya yaitu perspektif *The Old Public Administration* dan perspektif *The New Public Management*. Akar dari perspektif ini dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang Demokrasi. Paradigma *The New Public Service* berakar dari beberapa teori meliputi:

1. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan; perlunya pelibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik.
2. Model komunitas dan masyarakat sipil; akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun *social trust*, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis.
3. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru; administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (*human beings*) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya.

Dibawah ini dijelaskan mengenai karakteristik NPS. adapun karakteristik dari *New Public Services* akan ditampilkan berdasarkan tabel sekaligus perbandingannya dengan paradigma OPA, dan NPM.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Perkembangan Perspektif OPA, NPM dan NPS**

<b>Aspek</b>	<b><i>Old Public Administration</i></b>	<b><i>New Public Management</i></b>	<b><i>New Public Service</i></b>
Dasar teoritis dan fondasi epistemologi	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi
Rasionalitas dan model perilaku manusia	Rasionalitas <i>synoptic</i> ( <i>administrative man</i> )	Teknis dan rasionalitas ekonomi ( <i>economic man</i> )	Rasionalitas strategis atau rasionalitas formal (politik, ekonomi dan organisasi)
Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan publik mewakili agresi kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dialog dari berbagai nilai
Responsivitas pelayanan publik	<i>Client</i> dan <i>constituen</i>	<i>Customer</i>	<i>Citizen's</i>

<b>Aspek</b>	<b><i>Old Public Administration</i></b>	<b><i>New Public Management</i></b>	<b><i>New Public Service</i></b>
Peran pemerintah	<i>Rowing</i>	<i>Steering</i>	<i>Serving</i>
Pencapaian tujuan	Untuk badan pemerintah	Untuk organisasi privat dan non profit	Koalisi atau organisasi publik, non profit dan privat
Akuntabilitas	Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas	Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)	Multiaspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional
Diskresi administrasi	Diskresi terbatas	Diskresi diberikan secara luas	Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung-jawab
Struktur organisasi	Birokratik yang ditandai Dengan otoritas <i>top-down</i>	Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen	Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
Asumsi terhadap Motivasi pegawai dan <i>administrated</i>	Gaji dan keuntungan, Proteksi	Semangat <i>entrepreneur</i>	Pelayanan publik dengan Keinginan melayani Masyarakat

Sumber : Denhardt dan Denhardt (2003: 28-29)

#### **2.1.4 Governance**

Paradigma yang terakhir adalah *The New Public Governance* dimana penekanan paradigma ini ada pada pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan publik pada masyarakat. Sebagaimana dikutip dalam tulisan Nanang (2012) bahwa lahirnya paradigma ini adalah sebuah konsep yang mengkritik pada *The New Public Management* bahwa diantaranya adalah NPM bukan paradigma melainkan *Cluster* beberapa negara saja,

penerapan NPM hanya terbatas pada Anglo-America, Australia dan negara-negara Scandinavia.

Terminologi atau konsep *governance* kini menjadi satu idiom yang dipakai secara luas, sehingga dapat dimaknai atau diinterpretasikan juga dengan konsep atau terminologi yang mirip pemahamannya. Dalam penjelasan buku yang ditulis oleh Mulyadi dan Gedeona (2017) dijelaskan konsep *governance* acapkali digunakan dengan pemahaman yang sama untuk menjelaskan konsep: jaringan kebijakan (*policy networks*, Rhodes, 1997), manajemen publik (*public management*, Hood, 1990), koordinasi antar sektor ekonomi (Cambell el al, 1991), kemitraan publik-privat (Pierre, 1998), *corporate governance* (Williamson, 1996) dan *good governance* yang acapkali menjadi syarat utama yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga donor asing (Lefwich, 1994).

Konsep *governance* dalam Webster's Third New International Dictionary (dalam Frederickson, 1997) diartikan sebagai "*function of governing*", "*the state of being governed*", "*the manner or method of governing*", "*a system of governing*". Pengertian *governance* mengacu pada suatu metode, cara, strategi, sistem yang digunakan untuk melakukan proses pemerintahan, proses mengatur dalam suatu kantor (*office*). Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, *office* tidak hanya dipandang sempit secara harafiah. Namun dipandang secara luas yakni masyarakat dimana pemerintahan berada di situlah *office* berada. Sehingga *governance* dapat diterapkan dalam konteks internasional

(*international governance*), nasional (*national governance*), korporasi (*corporation governance*) ataupun di tingkat lokal (*local governance*). *Office* dari masing-masing *governance* tersebut menyesuaikan konteks yang melingkupi pelaksanaan *governance*.

*Governance* sebagaimana yang diungkapkan oleh Chhotray dan Stoker (2008) adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana terdapat pluralitas aktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi. UNESCAP (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific*) mendefinisikan *governance* sebagai *the process of decision making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)*. *Governance* didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan tersebut diimplementasikan. Proses pengambilan keputusan dan implementasi suatu keputusan melibatkan domain utama dari *governance*, yaitu negara atau pemerintah (*state*), dunia usaha (*private sector*) dan masyarakat madani (*civil society*).

Dalam domain *governance* selanjutnya sebagaimana diungkapkan oleh Rhodes (1997) dijelaskan bahwa *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*) yaitu *economic*, *political* dan *administrative*. *Economic governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision-making processes*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic governance*

mempunyai implikasi terhadap *equity, equality, dan quality of life*. *Political governance* adalah proses-proses pembuatan untuk formulasi kebijakan. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Sementara itu dalam konteks reposisi administrasi publik, Frederickson (1997) menginterpretasikan konsep *governance* dalam empat istilah: Pertama, *governance* menggambarkan bersatunya sejumlah organisasi atau institusi baik itu dari pemerintah atau swasta yang dipertautkan (*linked together*) secara bersama untuk mengurus kegiatan-kegiatan publik. Mereka dapat bekerja secara bersama-sama dalam sebuah jejaring antar negara. Karenanya terminologi *governance* pada pengertian pertama menunjuk pada konsep *networking* dari sejumlah himpunan-himpunan entitas yang secara kekuasaan otonom, atau dalam ungkapan Frederickson adalah perubahan citra sentralisasi organisasi menuju citra organisasi yang mandiri mempunyai delegatif dan terdesentralisir. Mereka bertemu untuk melakukan perembukan, merekonsiliasi kepentingan sehingga dapat dicapai tujuan secara kolektif atau bersama-sama. Kata kunci terminologi pertama ini adalah *networking, desentralisasi*.

Kedua, *governance* sebagai tempat berhimpunnya berbagai pluralitas pelaku bahkan disebut sebagai *hiper* pluralitas (partai politik, badan-badan legislatif dan divisinya, kelompok kepentingan dan masyarakat), untuk membangun sebuah kolaborasi yang baik dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Pusat kekuasaan tidak terfokus

lagi pada satu aktor, yakni pemerintah tetapi sudah menyebar kepada aktor-aktor atau pelaku-pelaku lainnya. Hal tersebut ditandai dengan makin berdayanya pusat-pusat pengambilan keputusan dan makin mandiri, serta proses pengawasan atau kontrol dapat dilakukan antar aktor yang ada, sehingga dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang baik dan berkualitas. Dengan demikian terminologi kedua menekankan *governance* dalam konteks pluralisme aktor dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Beberapa pertanyaan kunci yang penting: Seberapa jauh kebijakan yang dilakukan pemerintah merespon tuntutan masyarakat? Seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut? Seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam proses implementasi? Seberapa besar inisiatif dan kreativitas masyarakat tersalurkan? Seberapa jauh masyarakat dapat mengakses informasi menyangkut pelaksanaan kebijakan tersebut? Seberapa jauh hasil kebijakan tersebut memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan? Kata kunci dalam terminologi kedua ini adalah pluralitas aktor, kekuasaan yang makin menyebar, perumusan dan implementasi kebijakan bersama.

Ketiga, *governance* berpautan dengan kecenderungan kekinian dalam pengelolaan berbagai urusan publik, dimana terdapat jejaring kerjasama antar beberapa organisasi yang terikat secara organisasional dalam implementasi kebijakan. Dalam makna lebih luas *governance* merupakan jaringan (network) kinerja diantara organisasi-organisasi lintas vertikal dan horizontal untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Kata kunci

dalam terminologi ini adalah jaringan aktor lintas organisasi secara vertikal dan horizontal untuk mengatasi masalah publik tertentu.

Keempat, terminologi *governance* dalam konteks administrasi publik kental dengan sistem nilai-nilai kepublikan. *Governance* menyiratkan hal yang sangat penting. *Governance* menyiratkan suatu keabsahan. *Governance* menyiratkan sesuatu yang lebih bermartabat dan positif untuk mencapai tujuan publik, Sementara terminologi pemerintah (*goverment*) dan birokrasi relatif direndahkan, disepelekan dan cenderung mencerminkan sesuatu yang lamban serta kurang kreatif. *Governance* dipandang sebagai sesuatu yang akseptabel, lebih absah lebih kreatif, lebih responsif dan bahkan lebih baik segalanya.

Mempertimbangkan pemahaman terhadap keempat terminologi yang diulas sebelumnya, dapat disimpulkan tentang pemikiran Frederickson (1997) bahwa *governance* dalam konteks administrasi publik merupakan proses perumusan dan implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang dilakukan oleh berbagai aktor: pluralitas organisasi, dengan sifat hubungan yang lebih luwes dalam tataran vertikal dan horisontal, disemangati oleh nilai-nilai kepublikan antara lain keabsahan, responsif, kreatif, dan dilakukan dalam semangat kesetaraan dan *networking* yang kuat untuk mencapai tujuan publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **2.2 Electronic Government**

*E-government (Electronic Government)* yaitu sistem informasi yang

menggunakan internet dan teknologi digital lain untuk melakukan transaksi, layanan publik, komunikasi, koordinasi dan manajemen organisasi pemerintah. Pengembangan *e-government* dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan teknologi digital lainnya.

Menurut Richardus (2002:7) bahwa konsep *e-government* berkembang karena adanya pemicu utama, yaitu:

- 1) Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, *civil society*, *good corporate governance*, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global.
- 2) Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat berbagai belahan dunia dalam hitungan detik.
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas

dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya.

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *e-government* sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju pemerintahan yang baik. Tujuan utama *e-government* adalah untuk memberikan kepuasan yang terbaik kepada pengguna jasa atau untuk memberikan kepuasan maksimal. *E-government* diperuntukkan ke dalam:

- a) Pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan delivery layanan pemerintah kepada masyarakat, rekan bisnis, pegawai dan pemerintah lainnya;
- b) *E-government* sebagai suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien bagi keuntungan baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku bisnis;
- c) Pemanfaatan teknologi informasi seperti *wide area network* (WAN), *internet*, *world wide web*, komputer oleh instansi pemerintah untuk menjangkau masyarakat, bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya; dan
- d) Memperbaiki layanan kepada masyarakat, memperbaiki layanan kepada dunia bisnis dan industri, memberdayakan masyarakat

melalui akses kepada pengetahuan dan informasi, dan membuat pemerintah bekerja secara lebih efisien dan efektif.

Dasar kebijakan *e-government* di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government* disebutkan bahwa pengembangan *e-government* harus dilaksanakan secara harmonis dengan mengoptimalkan hubungan antara inisiatif masing-masing instansi dan penguatan kerangka kebijakan untuk menjamin keterpaduannya dalam suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja.

Tujuan strategis *e-government* yang perlu dilaksanakan berdasarkan aturan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas;
- 2) Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah daerah secara holistik;
- 3) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- 4) Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- 5) Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintahan maupun pemerintah daerah disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat
- 6) Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Pelaksanaan *e-government* di Indonesia sesuai dengan Nawa Cita yang berkaitan erat dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Konteks pemerintahan saat ini, penyelenggaraan *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dalam hal ini roadmap e government yang dirancang pemerintah mengacu pada trisakti yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pada esensinya *e-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology* (ICT)) dalam administrasi publik yang dibangun sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima berdasarkan pada tipe relasi *e-government*.

### **2.2.1 Tipe Relasi *E-Government***

Di dalam konsep *e-government* dikenal dengan empat jenis klasifikasi, yaitu: G-to-C, G-to-B, G-to-G, dan G-to-E.

#### **1) *Government to Citizens (Pemerintah ke Masyarakat)***

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, yaitu di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Tujuan utama aplikasi *e-government* bertipe G-to-C adalah

untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintah untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

## **2) *Government to Business (Pemerintah ke Pelaku Usaha)***

Tipe G-to-B ini merupakan tipe yang mendekatkan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Hal tersebut bertujuan untuk membangun relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis dengan tujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan usahanya, dan lebih jauh lagi G-to-B ini dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

## **3) *Government to Government (Pemerintah ke Pemerintah)***

Kebutuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi antar satu pemerintah dengan pemerintah (G-to-G) setiap harinya untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan sebagainya.

## **4) *Government to Employees (Pemerintah ke Pegawai/Aparat)***

Aplikasi *e-government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Sebagai contoh format G-to-E yaitu adanya sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan

kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

### **2.2.2 Manfaat *E-Government***

Penerapan *e-government* memiliki banyak manfaat dalam menunjang efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Menurut Al Gore dan Tony Blair dalam (Richardus, 2002) telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-government* bagi suatu negara, antara lain:

1. Mengurangi Biaya. Memberikan pelayanan secara *online* atau dalam jaringan secara signifikan dapat mengurangi total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholdernya* dibandingkan pelayanan secara manual.
2. Mendukung Perkembangan Ekonomi. Teknologi dapat memudahkan pemerintahan dalam menciptakan iklim bisnis dengan menyederhanakan tahapan administrasi atau mengurangi birokrasi. Dengan mendukung perkembangan ekonomi terdapat dampak langsung terhadap ekonomi seperti *e-procurement* atau proses lelang secara elektronik dengan menciptakan kompetisi yang lebih luas dan lebih banyak peserta.
3. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas. Penerapan *e-government* dapat meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

penerapan konsep *Good Corporate Governance*. Melalui *e-government* peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan dengan penyediaan informasi serta pelacakan dalam jaringan (*online tracking*) dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

4. Meningkatkan Pelayanan bagi Masyarakat. *E-government* memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa informasi dari pemerintah yang dapat diperoleh tanpa harus datang ke kantor-kantor pemerintahan. Informasi tersebut tersedia dalam 24 jam dan tujuh hari dalam seminggu tanpa harus bergantung pada jam operasional kantor pemerintahan.
5. Memberdayakan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh yang memungkinkan masyarakat dan pihak-pihak yang terikat sebagai mitra pemerintah terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik secara demokratis dan merata.

Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam pemerintahan (*e-government*) membuat masyarakat mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

### **2.2.3 Tahapan Dalam Membangun *E-Government***

Menurut Nugroho tahapan perkembangan implementasi e-

*government* di Indonesia dibagi menjadi empat. Tahapan perkembangannya e-government sebagai berikut:

- a) *Web Presence* yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.
- b) *Interaction*, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi Email dalam website pemerintah.
- c) *Transaction*, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
- d) *Transformation*, yaitu pelayanan dari pemerintah meningkat secara terintegrasi.

Kaitan konsep dan teori dalam tinjauan pustaka pada tesis ini adalah pada konteks pengaplikasian *E-Government* dalam Sistem Keamanan berbasis *Closed Circuit Television* (CCTV) di Kota Makassar. Hal tersebut memperkaya pemahaman penulis dan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengaplikasiannya di lapangan melalui penelitian penulis. Tesis ini melihat sejauh mana penerapan dimensi *e-government* melalui sistem keamanan berbasis *closed circuit television* (CCTV) di Kota Makassar

#### **2.2.4 Konsep *Electronic Government***

Secara umum, inisiatif *e-government* merangkul nilai-nilai politik serta nilai-nilai yang terkait dengan efisiensi. Yang terakhir bisa dibilang umum untuk semua inisiatif, seperti kelangkaan sumber daya, probabilitas secara keseluruhan, penyebut yang sama di semua negara dan sistem pemerintahan. Contohnya, efisiensi dalam pemerintahan merupakan nilai penting apakah suatu pemerintahan demokratis atau tidak dan apakah negara itu kaya atau miskin. Tujuan politik dari inisiatif *e-government* adalah fungsi tingkat demokratisasi pemerintah. Pertanyaan yang subset di antara mereka tujuan untuk dimasukkan dalam inisiatif *e-government* tertentu tergantung pada tingkat kesiapan *e-government*.

Dengan demikian, kerangka yang diusulkan didasarkan pada perbedaan di atas nilai-nilai terkait efisiensi umum di antara inisiatif *e-government* sementara tujuan politik prakarsa *e-government* bergantung pada dua dimensi utama: demokratisasi dan kesiapan *e-government*. Orang akan berharap bahwa negara-negara yang tinggi dalam demokratisasi kemungkinan besar akan melakukannya lebih memperhatikan nilai-nilai politik dalam inisiatif *e-government* mereka daripada demokratisasi yang rendah. Dengan cara yang sama, negara-negara dengan kesiapan *e-government* yang tinggi memiliki tingkat kesiapan kapasitas yang lebih besar untuk mencapai nilai-nilai politik dan nilai-nilai yang terkait dengan efisiensi dibandingkan dengan kesiapan *e-government* yang rendah. Dengan demikian, pendekatan yang lebih

rasional terhadap penetapan tujuan politik suatu Inisiatif untuk *e-government* perlu mempertimbangkan tingkat dari kedua dimensi ini. Dengan asumsi dua level (tinggi dan rendah) untuk setiap dimensi, empat kemungkinan kombinasinya adalah dapat dilihat dan dapat diwakili oleh empat kuadran dalam ruang dua dimensi. Setiap kuadran mencirikan serangkaian tujuan dominan dari inisiatif *e-government* dan, akibatnya, menyarankan disposisi strategis yang unik (informasi, transaksional, konsultasi, atau partisipasi) dari inisiatif tersebut.

Dari penjelasan tersebut, Nour et al (2008) mengemukakan *framework initiative e-government* yang dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.1**

***Framework Initiative E-Government Nour, et al (2008)***



Sumber : Nour, et al (2008)

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa *framework initiative e-government* yang dikemukakan oleh Nour, et.al (2008) menunjukkan bahwa terdapat empat kuadran yang dimana menjadi tolak ukur dalam menyimpulkan empat jenis disposisi dalam *e-government*. Keempat disposisi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Disposisi Informasional

Disposisi ini ditunjukkan oleh kuadran pertama yang digambarkan dengan rendahnya tingkat demokratisasi dan kesiapan *e-government*. Tujuan *e-government* yang utama dan dapat dicapai secara realistis di sini adalah menyediakan akses yang siap dan efisien ke informasi pemerintah (efisiensi informasi). Negara-negara di kuadran ini (misalnya, negara-negara Afrika Sub Sahara) cenderung dicirikan oleh kelangkaan sumber daya yang ekstrim yang menentukan fokus utama pada efisiensi. Tujuan politik (misalnya, daya tanggap demokratis, akuntabilitas publik, transparansi, dll.) sebenarnya merupakan kemewahan bagi negara-negara di kuadran ini. Perhatian utama di sini adalah bahwa *e-government* dapat digunakan sebagai instrumen kontrol dan manipulasi. Misalnya, dalam kediktatoran pemerintah dapat memberikan informasi semacam itu yang akan melayani tujuan tersembunyinya untuk mempertahankan atau meningkatkan cengkeramannya terhadap penduduknya. Dengan demikian, disposisi strategis inisiatif *e-government* yang dilakukan oleh negara-negara di kuadran ini harus bersifat informasional dan terutama menekankan akses ke informasi pemerintah.

## 2. Disposisi Transaksional

Disposisi ini dihasilkan dari kuadran kedua yang diwakili oleh kesiapan *e-government* yang tinggi dan tingkat demokratisasi yang rendah. Ada tiga nilai yang cenderung dominan di kuadran ini: efisiensi transaksional, efektivitas/kualitas pelayanan, dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbeda dengan negara-negara di kuadran pertama, negara-negara di kuadran ini (misalnya, Malaysia dan Singapura) berupaya menyediakan tidak hanya akses informasi yang efisien tetapi juga penyampaian layanan publik yang efisien dan efektif serta integritas dalam penyediaan layanan tersebut. Di sini fokusnya adalah pada efisiensi, efektivitas, dan integritas dalam penyampaian layanan publik. Fokus pada penyampaian layanan yang efektif mungkin merupakan pilihan kebijakan pragmatis di lingkungan di mana tingkat demokratisasi yang lebih tinggi tidak dapat dilakukan karena satu dan lain hal. Dengan demikian, disposisi strategis inisiatif *e-government* yang dilakukan oleh negara-negara di kuadran ini harus bersifat transaksional dan karenanya terutama menekankan pada tujuan dominan yang disebutkan di atas.

## 3. Disposisi Konsultasi

Kuadran ketiga mewakili kombinasi dari tingkat demokratisasi yang tinggi dan tingkat kesiapan *e-government* yang rendah yang menunjukkan disposisi konsultasi. Nilai-nilai politik *e-government* lebih cenderung menjadi yang terpenting, meskipun infrastruktur *e-government* yang terbatas di sini menimbulkan kendala nyata dalam realisasi nilai-nilai ini.

Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi (misalnya transparansi dan integritas) yang tidak memerlukan dialog kebijakan antara pemerintah dan warga negara masih dapat dicapai dalam konteks ini. Sebaliknya, nilai-nilai seperti partisipasi demokratis dan daya tanggap mengandaikan dialog atau interaktifitas warga-pemerintah, nilai-nilai yang mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh tingkat teknologi dan pendidikan di kuadran ini.

#### 4. Disposisi Partisipatif

Kuadran keempat tinggi pada indeks kesiapan demokratisasi dan *e-government*, menunjukkan disposisi partisipatif. Apa yang membedakan kuadran ini dari tiga kuadran sebelumnya adalah bahwa kuadran ini mewakili pengaturan dimana realisasi semua tujuan (baik yang terkait politik maupun efisiensi) dari *e-government* dapat dilakukan. Meskipun tujuan politik adalah yang terpenting disini, tujuan yang berhubungan dengan efisiensi juga penting, terutama dalam konteks stagnasi ekonomi yang berkepanjangan dan defisit fiskal yang kronis. Selain itu, akuntabilitas publik, yang diharapkan sebagai hasil dari demokratisasi yang tinggi, tidak hanya mendikte penggunaan sumber daya publik secara efisien dan efektif, tetapi juga integritas dalam penggunaan aspek kepercayaan publik ini.

### **2.3 Konsep *E-Readiness* (Kesiapan Penerapan *Electronic Government*)**

Secara umum *e-Readiness* adalah kemampuan suatu individu ataupun kelompok untuk siap dalam memanfaatkan teknologi. Adapun

kesiapan elektronik disebut sebagai suatu ukuran terhadap kesiapan secara nasional, ekonomi, dan persiapan untuk menerima manfaat dari penggunaan ICT. Indrajit, et al. (2005) berpendapat bahwa *e-readiness* ini menjadi prasyarat utama untuk pembangunan *e-government*. Indrajit et al. (2005) menjelaskan pengertian *e-Readiness* merupakan pemeringkatan dalam penilaian tingkat kesiapan suatu negara dalam memanfaatkan teknologi informasi, khususnya untuk pelaksanaan *e-government*.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, kesiapan memanfaatkan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut:

1. *e-Leadership*; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
2. Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.
3. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
4. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang

mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.

5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi di dalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Selain itu Kovacic (2005: 183) menjelaskan pengertian *e-readiness* dan juga menjabarkan indikator-indikator penilaian kesiapan sebagai berikut:

*“e-government readiness is defined as the aptitude of a government to use ICTs to move its services and activities into the new environment. While the e-readiness assessment indicators vary, most tend to measure ICT connectivity, ICT use and integration, training, human capacity, government policies and regulation, infrastructure, security, and economy”.*

Kovacic (2005) menekankan pada kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dalam menjalankan pemerintahan dengan kondisi yang berbeda, yaitu dengan menggunakan penerapan ICT. Pemerintah perlu beradaptasi dengan transformasi pelayanan dan aktivitas dari sistem konvensional menjadi berbasis online. Hal ini pun selaras dengan penjelasan Budhiarja dan Sachdeva (2002) dalam Azab (2009:97) mengenai e-readiness yaitu: *“e-readiness is essentially the degree in which a community is qualified to participate in the Networked World”.* Dalam penjelasan tersebut ditekankan bahwa pada dasarnya e-readiness atau

kesiapan elektronik suatu negara membahas tingkat suatu komunitas memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam dunia penggunaan teknologi.

Adapun Indrajit et al. (2005:11) menjelaskan mengenai hal utama yang menjadi patokan untuk melihat siap atau tidaknya suatu instansi menerapkan konsep *e-government*, yaitu: “kesiapan dalam penerapan konsep *e-government* sangat bergantung pada dua hal utama yang secara langsung akan berdampak pada jenis atau model *e-government* yang akan diterapkan, yaitu:

- Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di negara atau daerah terkait; dan
- Ketersediaan sumber daya yang terdapat pada domain masyarakat dan pemerintah tersebut.”

Dari pendapat diatas penulis melihat bahwa dalam mempersiapkan penerapan *e-government* ini bukan hanya melibatkan pemerintah saja, namun juga melibatkan seluruh elemen yang ada dalam suatu pemerintahan, dimana yang dimaksud adalah masyarakat itu sendiri. Selain itu Indrajit et al. (2005:12-13) pun menjabarkan kembali secara lebih rinci mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi penentu kesiapan pemerintah dalam menerapkan *e-Government*, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan *e-government*. Secara ideal memang harus tersedia

infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan *e-government* yang telah disepakati. Namun secara pragmatis, harus pula dipertimbangkan potensi dan kemampuan atau status pengembangan infrastruktur telekomunikasi di lokasi terkait. Untuk daerah yang masih memiliki infrastruktur yang teramat sangat minim, sebaiknya dipikirkan pola kerjasama dengan sejumlah pihak swasta guna mengundang mereka berinvestasi di daerah terkait.

## 2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah

Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan memperlihatkan sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep *e-government*. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali lembaga internasional yang telah memberikan bantuan dana pinjaman atau hibah untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrumen tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak yang tidak dirawat sehingga sudah dalam kondisi rusak.

## 3. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah

Subjek yang akan menjadi “pemain utama” di dalam inisiatif *e-government* yang akan diterapkan, membutuhkan sejumlah sumber daya manusia di Lembaga pemerintahan untuk bekerja, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa dalam penerapan *e-government*. Semakin tinggi tingkat *information*

*technology literacy* sumber daya manusia (SDM) di pemerintah, semakin siap mereka dalam menerapkan konsep *e-government*.

#### 4. Ketersediaan Dana dan Anggaran

Sekecil apapun inisiatif *e-government* yang akan diterapkan, sangat terlihat jelas bahwa dibutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya. Pemerintah daerah tentu harus memiliki jaringan yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang ada dan memiliki otoritas untuk menganggarkannya. Perlu juga diperhatikan bahwa dana yang dibutuhkan tidak hanya untuk investasi saja, melainkan perlu juga untuk dianggarkan dalam biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan di kemudian hari.

#### 5. Perangkat Hukum

Konsep *e-government* sangat berkaitan erat dengan usaha dalam penciptaan dan pendistribusian data atau informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data atau informasi dan hak cipta intelektual merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang dapat menjamin terciptanya mekanisme *e-Government* yang kondusif.

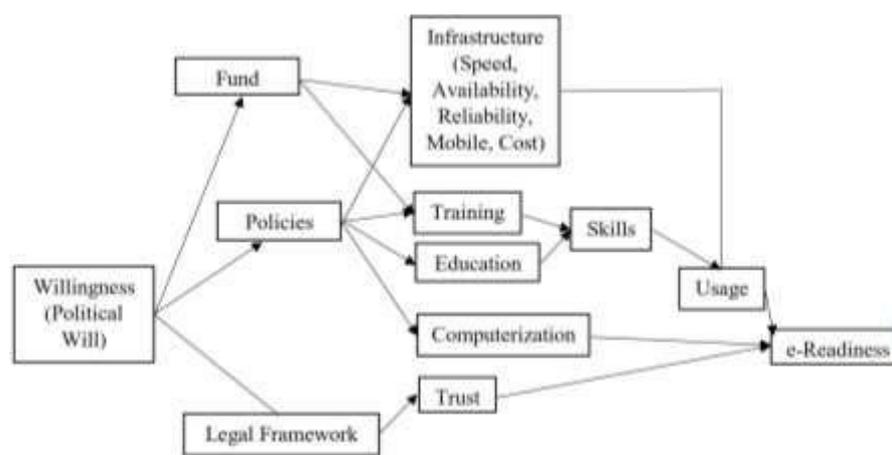
#### 6. Perubahan Paradigma

Penerapan *e-government* pada hakekatnya adalah merupakan suatu proyek *change management* yang membutuhkan adanya keinginan untuk merubah paradigma dan cara berfikir. Perubahan paradigma dalam hal ini diharapkan akan menimbulkan kesadaran dan keinginan untuk

merubah cara kerja, sikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika pimpinan dan bawahan di dalam pemerintahan tidak ingin berubah maka mereka dapat dikatakan belum siap dalam menerapkan konsep *e-government*.

Disisi lain, Musa (2010) dalam risetnya tentang alat penilaian *e-readiness* untuk regional pemerintah daerah di Iraq menawarkan sebuah metode pengukuran *e-Readiness*. Metode ini mengukur aspek tertentu dari masyarakat dan beberapa fitur layanan dan teknologi yang diperlukan dalam transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari sistem konvensional ke arah digital atau disebut dengan *e-government*. Metode tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan indikasi terbaik tentang variabel yang mempengaruhi *e-government*, sehingga hasil pengukuran tersebut dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan apa saja yang patut menjadi prioritas dan perbaikan yang harus dilakukan ke depannya dalam meningkatkan *e-readiness* suatu organisasi. Adapun model yang dikembangkan oleh Musa (2010) yaitu:

**Gambar 2.2**  
**Model E-Readiness**



Sumber : Musa (2010)

Adapun indikator yang diusulkan Musa (2010) sebagai instrumen pengukuran *e-Readiness* di tingkat pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator E-Readiness**

No.	<i>Infrastructure</i>	<i>Human Resource (Users and Government Employees)</i>	<i>Government and Management</i>
1	<i>Speed of Internet</i>	<i>Government Trust</i>	<i>Computerization</i>
2	<i>Availability</i>	<i>Skills</i>	<i>Willingness (Political Will)</i>
3	<i>Cost of Internet</i>	<i>Education</i>	<i>Fund</i>
4	<i>Reliability</i>	<i>Usage</i>	<i>Policies</i>
5	<i>Mobile Internet</i>	<i>Training</i>	<i>Legal Framework</i>

Sumber : Musa (2010)

Kovacic (2005) menjabarkan indikator-indikator penilaian kesiapan

elektronik yaitu konektivitas TIK, penggunaan dan integrasi TIK, pelatihan, kapasitas SDM, kebijakan dan regulasi pemerintah, infrastruktur, keamanan, dan ekonomi. Adapun Indrajit et al. (2005) menjabarkan 6 faktor yang dapat menjadi penentu kesiapan pemerintah dalam menerapkan *e-Government*, yaitu infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh Pemerintah, kesiapan sumber daya di Pemerintah, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, perubahan paradigma. Terakhir yaitu Musa (2010) yang mengembangkan konsep pengukuran *e-readiness* dengan tiga indikator yaitu *infrastructure*, *human resources*, dan *government & management*.

#### **2.4 Kebijakan *Closed Circuit Television* (CCTV)**

CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara *real time*, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti: bank, hotel, bandara, toko, pabrik maupun pergudangan. Bahkan pada perkembangannya, rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi.

Sistem CCTV pertama dipasang oleh Siemens AG pada Test Stand VII di Peenemunde, Jerman pada tahun 1942. CCTV tersebut digunakan untuk mengamati peluncuran V-2 roket, mencatat insinyur dari Jerman

(Walter Bruch) yang bertanggung jawab untuk design dan instalasi sistem. Sistem perekaman CCTV masih sering digunakan di tempat peluncuran modern untuk merekam penerbangan roket, untuk menemukan kemungkinan penyebab kerusakan, sementara roket yang lebih besar sering dilengkapi dengan CCTV yang memungkinkan gambar-gambar menjadi tahap pemisahan ditransmisikan kembali ke bumi dengan *link* radio.

Pada bulan September 1968, Olean, New York adalah kota pertama di Amerika Serikat yang menginstal kamera video sepanjang jalan bisnis utama dalam upaya untuk memerangi kejahatan. Penggunaan kamera televisi sirkuit tertutup untuk perpindahan gambar ke kepolisian Olean sehingga mendorong Departemen Olean ke teknologi terdepan melawan kejahatan. Penggunaan CCTV di kemudian hari menjadi sangat umum di bank dan toko untuk mencegah pencurian, dengan merekam bukti kegiatan kriminal.

Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan *broadcast signal* (Herman Dwi Surjono 2013). Cara kerja CCTV hampir sama dengan

stasiun televisi, yaitu mengirimkan data berupa gambar dan suara ke sebuah monitor. Perbedaannya, stasiun televisi mengirimkan data melalui menara pemancar, sedangkan CCTV mengirimkan data melalui media kabel atau *wifi* yang dipasang atau dipancarkan pada sebuah monitor tersebut. Jadi, CCTV diibaratkan stasiun televisi yang hanya mengirimkan data ke satu tujuan. Itulah alasan penambahan kata *Closed-Circuit*. *Closed Circuit* artinya jalur pengiriman data yang bersifat tertutup yang tidak sembarang orang mampu mengaksesnya. Umumnya, pengiriman data kamera CCTV ke monitor atau *video recorder* menggunakan koneksi kabel atau non-kabel (Budi Cahyadi 2014). Penggunaan video kamera yang mengirim sinyal atau penyiaran yang tertuju pada lingkup perangkat tertentu yakni kepada seperangkat monitor “spesifik-terbatas”. Penyiaran rekaman CCTV tidak secara bebas dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor “spesifik-terbatas” yang telah disediakan. rekaman CCTV memiliki manfaat sebagai dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau PC secara *real time* dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau.

Adapun kegunaan CCTV yaitu:

- Pencegahan tindak kriminal, melalui CCTV kita dapat mengawasi keamanan suatu tempat dan apabila dalam pengawasan tindak kriminal terjadi, langkah pencegahan bisa langsung diambil saat itu

juga. Contohnya, bila terjadi kehilangan atau kecurian barang di suatu tempat, *server* dapat langsung tahu dan menghubungi pihak keamanan.

- Proses industri, dalam proses industri khususnya industri kimia, terdapat ruangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka, dalam pengawasannya diperlukan CCTV yang dapat ditambah kemampuan khusus seperti kemampuan mengukur temperatur.
- *Traffic monitoring*, dengan menggunakan CCTV yang dipasang di perempatan jalan dan tempat strategis lainnya, kita juga dapat mengawasi keadaan lalu lintas sehingga bila terdapat kemacetan dan kecelakaan, dapat diatasi dengan cepat.
- Keamanan transportasi, dengan memasang CCTV pada transportasi umum, keamanan penumpang bisa terjaga sehingga penumpang bisa memakai fasilitas dengan tenang.
- *Monitoring* pada perkebunan, teknologi CCTV dapat diintegrasikan dengan *Internet of Things* untuk memantau hasil perkebunan. Contohnya untuk mengamati buah yang matang atau belum pada suatu area perkebunan berdasarkan gambar dari buah tersebut yang diambil melalui CCTV.
- Tindak kriminal, CCTV juga bisa dipakai untuk tindak kriminal seperti melihat pin ATM seseorang dengan cara memasang kamera di ATM.

CCTV yang telah terpasang di wilayah Kota Makassar terdiri berbagai tipe dan spesifikasi, CCTV tersebut telah mampu melakukan

perekaman gambar atau video tanpa henti, serta data rekamannya dapat dianalisis kembali.

Adapun kriteria dasar Penempatan CCTV di kota Makassar berdasarkan; tingkat kerawanan sosial, tingkat kemacetan lalu lintas, nilai aset pemerintah, dampak lingkungan, dan sebagainya. Berdasarkan kriteria tersebut CCTV Kota Makassar sudah ada di jalan provinsi, jalan kota, di bangunan aset pemerintah, lorong-lorong, tempat pengelolaan sampah, di bank sampah, dan sebagainya.

Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 CCTV ini bertujuan untuk:

- Mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka perlindungan kepada masyarakat, mempermudah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di ruang publik sekitar area bangunan gedung; dan
- Mengintegrasikan sistem keamanan CCTV bangunan gedung dengan sistem informasi pemerintah daerah sehingga dapat mengoptimalkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di ruang publik sekitar area bangunan gedung.

## **2.5 Sistem Keamanan Berbasis *Closed Circuit Television (CCTV)* di Kota Makassar**

Mengembangkan *smart city* di Kota Makassar bukan dengan

menjadikan IT dan solusi teknologi sebagai tujuan akhir, akan tetapi lebih fokus kepada inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan masalah prioritas dan atau mengembangkan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi, dan kolaboratif antar sektor. Dan tentu saja, pembangunan berbasis *smart city* secara simultan harus bisa menghasilkan *smart people* dan *smart society*.

Pembangunan *Smart City* tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*.

Program *Makassar Smart City* merupakan program solutif untuk menjadikan Makassar 2x+baik dengan tagline *Sombere & Smart City*. *Sombere* adalah kearifan lokal Makassar yang berarti *hospitality*, keramahan, yang menjadi karakter Makassar. Dengan visi *smart city* : *to create makassar as a liveable world class city for all* dengan misi Program *Smart City* Kota Makassar akan terus menjawab berbagai tantangan perubahan, mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahan tersebut (*understanding*), dan dapat mengatur (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya.

Kota Makassar dengan visi *smart city* dan *sombere*, dengan jumlah penduduk telah mencapai 1,7 jiwa lebih, denyut jantung kota

yang terus menggeliat, aktivitas ekonomi dan sosial seperti tidak tidur, diminta atau pun tidak diminta Pelayanan Publik (tertentu) harus lebih responsif (tangkas) dan *standby* (online) 24 Jam.

Fenomena keamanan maya nasional terus menjadi kritis karena masyarakat global semakin terkoneksi dengan serangan *cyber* baru yang semakin meningkat. Kota Makassar akan memanfaatkan untuk menjadi pusat regional untuk keamanan maya melalui memastikan ruang *cyber* yang aman dan tangguh. Untuk mencapai hal ini, lebih banyak penelitian dan pengembangan di bidang ini harus dilakukan untuk menerapkan kebijakan, kerangka hukum, kelembagaan dan investasi yang kondusif.

Dengan luas Kota Makassar 172 km persegi, CCTV telah menjadi alat penting untuk meningkatkan responsibilitas dan efektifitas pelayanan publik Pemerintah Kota Makassar. Kebutuhan CCTV Kota Makassar minimal 3.500 unit (berdasarkan panjang jalan kota 1.548 km) jika jarak antar titik 500 meter.

Adapun kriteria dasar penempatan CCTV di Kota Makassar adalah berdasarkan tingkat kerawanan sosial, tingkat kemacetan lalu lintas, pemantauan asset pemerintah, dampak lingkungan, dan sebagainya

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Sebagai sebuah aktifitas yang berada pada koridor pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini perlu untuk mendapatkan perbandingan dari berbagai penelitian sebelumnya. Perbandingan yang dilakukan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya difokuskan pada bagaimana tujuan

penelitian terdahulu, hasil yang didapatkan oleh penelitian terdahulu dan apa yang membedakan dengan penelitian saat ini. Terakhir perlu untuk dikemukakan relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Yang Dilakukan
1.	Juwita Pratiwi Lukman (2021)	Untuk menganalisis <i>e-government</i> dalam sistem pengelolaan keuangan desa (siskeudes) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>e-government</i> dalam sistem keuangan desa (siskeudes) belum berjalan secara efektif	Sama-sama meneliti terkait <i>e-government</i>
2.	Lisa Megawati (2020)	Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh <i>e-government</i> terhadap disiplin pegawai di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan presentase indikator variabel disiplin pegawai pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja berada pada kategori baik dengan tingkat pencapaian sebesar 73,75% yang dalam kontinum interpretasi skor berada pada interval 80-100 atau kategori setuju/baik	Sama-sama meneliti terkait <i>e-government</i>
3.	Citra Annisa (2011)	Untuk melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi <i>e-government</i> melalui bursa kerja online pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan komunikasi antara pemerintah sudah baik, komunikasi pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat masih belum baik, dari segi sumber daya dan disposisi masih kurang baik, dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, serta masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik.	Sama-sama meneliti terkait <i>e-government</i>

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Yang Dilakukan
4.	Ummu Kalsum (2019)	Untuk menganalisis hasil inovasi pelayanan publik (studi kasus pelayanan <i>closed circuit television</i> (CCTV) di Kota Makassar) berdasarkan kriteria Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan <i>closed circuit television</i> (cctv) di Kota Makassar berdasarkan kriteria Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) cukup berhasil namun masih memiliki kekurangan	Sama-sama meneliti terkait <i>closed circuit television</i> di Kota Makassar
5.	Ahmad Harakan dan Ferawaty (2020)	Untuk menganalisis <i>collaborative governance</i> dalam menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV di Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan <i>collaborative governance</i> antara Pemerintah Kecamatan Panakkukang, Dinas Kominfo Kota Makassar, Polrestabes Makassar, Pihak Swasta dan Masyarakat dilakukan dengan mengadakan dialog tatap muka disertai adanya rasa saling membangun kepercayaan, komitmen untuk memproses dan saling berbagi pemahaman antar aktor yang terlibat untuk meningkatkan keamanan di wilayah Kecamatan Panakkukang	Sama-sama meneliti terkait <i>closed circuit television</i> di Kota Makassar

Sumber : Olahan Data, 2023

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, penjelasannya dapat dilihat pada uraian di bawah berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Juwita Pratiwi Lukman pada tahun 2021 yang berjudul “efektivitas *E-Government* dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Pacconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-

*government* dalam sistem pengelolaan keuangan desa (siskeudes) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari tiga aspek, yaitu pertama, struktur, adanya ketidaksesuaian penempatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan siskeudes; kedua, proses, kesiapan pemerintah desa belum didukung oleh sarana bimbingan teknis dan pelatihan dalam penggunaan sistem keuangan desa; dan ketiga, hasil, terobosan teknologi informasi melalui Siskeudes berpengaruh terhadap kemudahan dan transparansi keuangan.

Kedua, penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan *E-Government* terhadap Disiplin Pegawai di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja” yang dilakukan oleh Lisa Megawati tahun 2020. Penelitian ini mengulik seberapa besar pengaruh variabel *E-Government* terhadap variabel disiplin pegawai di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja sehingga menunjukkan hasil bahwa hasil perhitungan persentase indikator variabel disiplin pegawai pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja berada pada kategori baik dengan tingkat pencapaian sebesar 73,75% yang dalam kontinum interpretasi skor berada pada interval 80-100 atau kategori setuju/baik.

Ketiga, penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 oleh Citra Annisa yang berjudul “Implementasi *E-Government* melalui Bursa Kerja Online pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi *e-government*

melalui bursa kerja online dilihat melalui empat indikator penentu keberhasilan implementasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berbeda dengan penelitian yang dijelaskan diatas terkait *e-government*, penelitian yang keempat ini berkaitan dengan *closed circuit television* di Kota Makassar. Penelitian ini berjudul “Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan *Closed Circuit Television* (CCTV) di Kota Makassar)” tahun 2019 yang dilakukan oleh Ummu Kalsum. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan fokus pada hasil inovasi dari pelayanan *closed circuit television* (CCTV) di Kota Makassar. Ada pun desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), serta pengumpulan data dilakukan dengan wawancara narasumber terkait.

Selanjutnya, penelitian yang kelima ini berjudul “*Collaborative Governance* dalam Menjalankan Sistem Keamanan Berbasis *Closed Circuit Television* (CCTV) di Kota Makassar”. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Harakan dan Ferawaty tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Ansell dan Gash pada bentuk *collaborative governance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana dimensi *electronic government* dalam sistem keamanan berbasis *closed*

*circuit television* (CCTV) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dengan menggunakan framework initiative *e-government* oleh Nour, et al (2008).

## **2.7 Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan alur pemikiran yang diambil dari teori yang dianggap relevan dengan fokus / judul penelitian dalam upaya menjawab rumusan masalah pada penelitian tersebut. Dalam teori yang dikemukakan oleh Nour, et al (2008) menjelaskan bahwa dalam *framework e-government* memiliki empat disposisi, yaitu 1) Informasional, 2) Transaksional, 3) Konsultasi, dan 4) Partisipatif. Penulis menggunakan keempat disposisi tersebut sebagai fokus penelitian.

Permasalahan terkait keamanan lingkungan sangatlah penting untuk diperhatikan. Meskipun pemerintah telah menjamin keamanan masyarakat dengan berbagai upaya salah satunya pelaksanaan sistem keamanan, namun selaku warga negara kita tetap bertanggung jawab atas keamanan lingkungan masing-masing.

Seperti yang telah kita tahu bahwa sekarang aparat-aparat pemerintah melaksanakan tugas memberikan keamanan bagi masyarakatnya dengan jauh lebih baik. Dan sebagai perwujudannya, pemerintah Kota Makassar menerapkan sistem keamanan berbasis *Closed Circuit Television* (CCTV) di beberapa titik wilayah di Kota Makassar. Kendati demikian, pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan

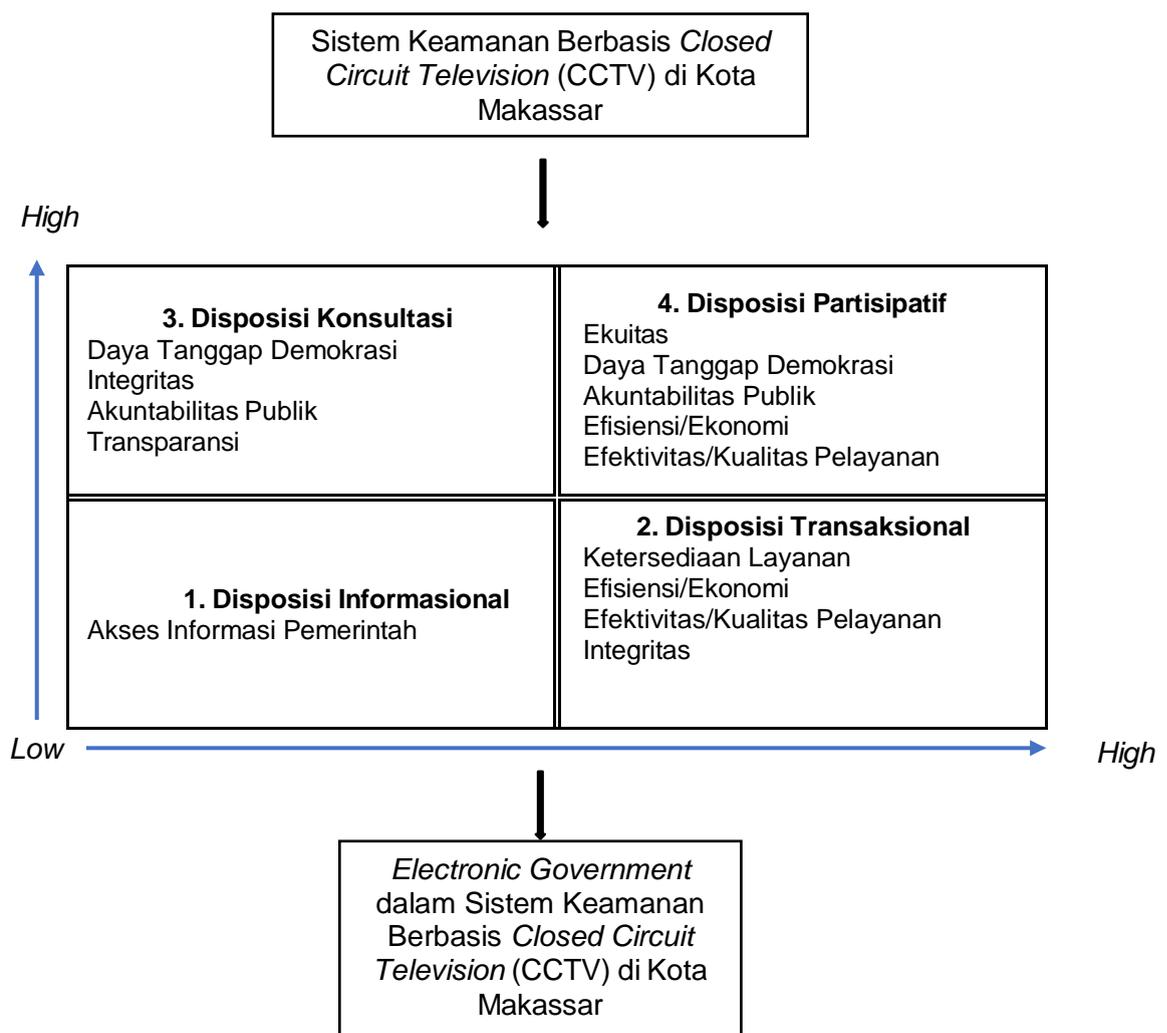
sistem keamanan tersebut telah menerapkan konsep *e-government* yakni dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan publik, yakni terkait masalah keamanan.

Kompleksnya permasalahan sistem keamanan di Kota Makassar, menuntut penanganan yang bersifat komprehensif dan membutuhkan perhatian yang lebih dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat terlaksana secara efisien dan efektif, dengan kata lain ialah dengan memanfaatkan konsep *e-government* khususnya pada Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagai *leading sector*. Dengan demikian, maka penulis menganggap bahwa studi tentang *E-Government* dalam Program Sistem Keamanan Berbasis *Closed Circuit Television* (CCTV) di Kota Makassar urgen untuk dilaksanakan sehingga dapat melihat dan menganalisis lebih komprehensif terkait bagaimana dimensi-dimensi dalam *e-government* dapat memberikan pelaksanaan sistem keamanan berbasis *Closed Circuit Television* (CCTV) yang baik agar mampu dilaksanakan dengan mudah, efektif dan efisien serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat menekan jumlah kejahatan serta kriminalitas atau hal-hal yang tidak diinginkan yang mengancam keamanan masyarakat di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melihat bagaimana *Electronic Government* dalam Sistem Keamanan Berbasis *Closed Circuit Television* (CCTV) di Kota Makassar, dengan menggunakan *framework*

*initiative e-government* dari Nour, et al (2008). Berikut adalah indikator dari keempat disposisi *e-government* tersebut:

1. Disposisi Informasional
2. Disposisi Transaksional
3. Disposisi Konsultasi
4. Disposisi Partisipatif



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Konsep**